

**Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan yang di Pisah,
dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah terhadap
Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan**

Dina Mellita¹, Sesi Emi Dianty²
Universitas Bina Darma

dinamellita@binadarma.ac.id, sesiemidiyanti@gmail.com.

ABSTRACT

Regional expenditures are regional obligations that are recognized as expenditures made within a predetermined fiscal year period. This study aims to analyze local taxes, regional levies, separated management results, and legitimate local revenue (PAD) against regional spending. This study uses multiple linear analysis with SPSS. The results of the study are regional taxes and separate management results which have a significant positive effect, and the results of regional levies and regional original revenue (PAD) which are valid have a significant negative effect on regional spending. The government should pay more attention to efforts to increase the main regional financial sources used to finance regional expenditures such as regional original income (PAD) which consists of regional tax revenues, regional levies, separated wealth management results, and legitimate regional original income (PAD).

Keywords: regional spending, regional taxes, regional fees, separate management results, legitimate local revenue (PAD)

PENDAHULUAN

Otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk dapat memberikan pelayanan yang sebaikbaiknya kepada masyarakat, salah satu bentuk pelayanan tersebut adalah memberikan informasi yang transparan dan akuntabel. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Wahab dkk., 2018). Sebagai konsekuensi di dalam melaksanakan otonomi daerah, pemerintah dituntut untuk mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan, salah satunya belanja daerah. Belanja daerah adalah kewajiban daerah yang diakui sebagai pengeluaran yang dilakukan dalam periode tahun anggaran yang telah ditetapkan. Belanja daerah wajib dilakukan untuk pelaksanaan pengaturan dan memfasilitasi pelaksanaan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undang (Pratomo, 2016).

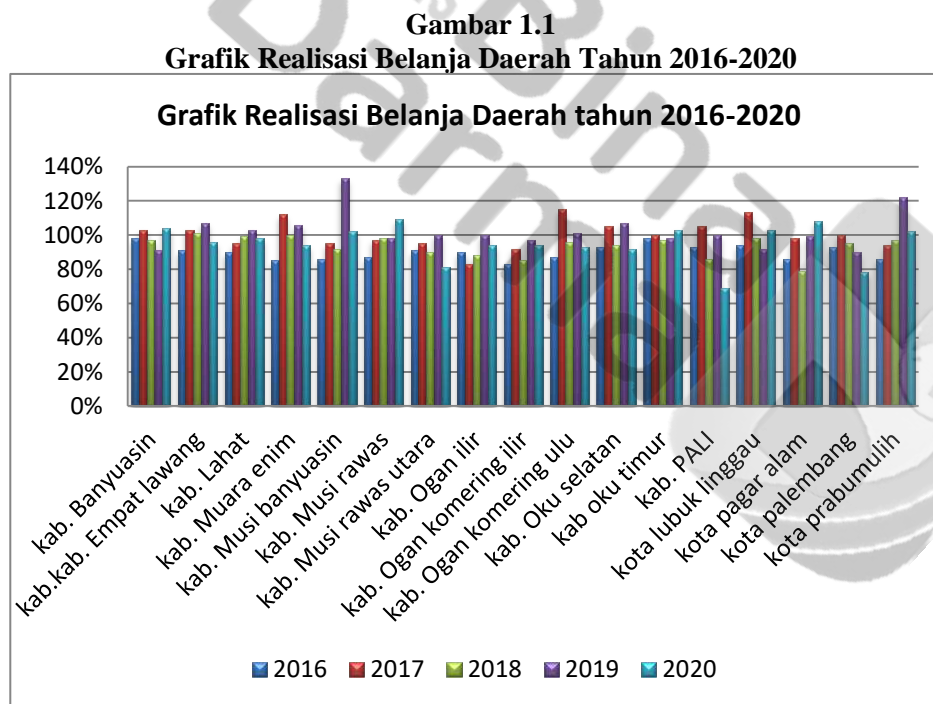
Tabel 1 Data Realisasi Belanja Daerah di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2020

NO	Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kab. Banyuasin	98,36%	103,6%	97,86%	91,71%	104,57%
2.	Kab. Empat Lawang	91,6%	103,57%	101,71%	107,55%	96,8%
3.	Kab. Lahat	90,9%	95,91%	99,78%	103,06%	98,22%
4.	Kab. Muara Enim	85,76%	112,44%	100,71%	106,27%	94,84%
5.	Kab. Musi Banyuasin	86,82%	95,86%	92,34%	133,46%	102,97%
6.	Kab. Musi Rawas	87,45%	97%	98,03%	98,1%	109,72%
7.	Kab. Musi Rawas Utara	91,12%	95,63%	90,02%	100,78%	81,61%
8.	Kab. Ogan Ilir	90,54%	83,95%	88,82%	100,37%	94,92%
9.	Kab. Ogan Komering Ilir	83,33%	92,95%	85,6%	97,9%	94,24%
10.	Kab. OKU	87,69%	115,35%	96,96%	101%	93,54%

11.	Kab. Oku Selatan	93,58%	105,79%	94,22%	107,45%	92,01%
12.	Kab. Oku Timur	98,19%	100,62%	97,71%	98,71%	103,5%
13.	Kab. PALI	93,76%	105,93%	86,01%	100,84%	69,45%
14.	Kota Lubuk Linggau	94,23%	113,97%	98,99%	92,48%	103,68%
15.	Kota Pagar Alam	86,55%	98,36%	79,31%	99,62%	108,65%
16.	Kota Palembang	93,05%	100,98%	95,54%	90,55%	78,81%
17.	Kota Prabumulih	86,67%	94,34%	97,5%	122,91%	102,47%
Sumatera Selatan		89,44%	98,82%	101,45%	101,60%	93,58%

(Sumber: DJPK Departemen Keuangan (2022))

Fenomena yang terjadi pada tabel 1.1 diatas dapat dijelaskan bahwa tingkat realisasi belanja daerah dari 17 kabupaten/kota provinsi sumatera selatan tahun 2016-2020 secara berurutan sebesar 89,44%, 98,82%, 101,45%, 101,60%, 93,58%. Dari hal itu dapat dilihat hanya pada tahun 2018-2019 yang mencapai target 100%. Kemudian ditahun 2020 mengalami penurunan yang cukup tajam hingga hanya terealisasi sebesar 93,58%. Data realisasi belanja daerah di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016-2020 dapat dilihat juga melalui grafik berikut.



(Sumber: data diolah 2022)

Tingkat belanja daerah Provinsi di Sumatera Selatan tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi yang cukup signifikan terutama di tahun 2019 ke 2020 rata-rata mengalami penurunan kecuali Kabupaten Banyuasin, Musi Rawas, OKU Timur, dan kota Lubuk Linggau. Kabupaten Musi Banyuasin memiliki realisasi belanja daerah tertinggi yaitu sebesar 133,46% ditahun 2019. Sedangkan kabupaten PALI memiliki realisasi terendah yaitu sebesar 69,45% ditahun 2020. Berdasarkan grafik tersebut, dapat dilihat bahwa realisasi belanja daerah Provinsi Sumatera Selatan belum melihat nilai yang optimal karena masih banyak Kota/Kabupaten yang realisasi belanja daerahnya dibawah 100%. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih sangat bergantung pada dana yang diberikan oleh pemerintah pusat. Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk membuat suatu penelitian yang berjudul pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan yang di pisah, dan pendapatan asli daerah (PAD) yang sah terhadap belanja daerah provinsi sumatera selatan.

STUDI LITERATUR

Belanja Daerah

Menurut DJPK Departemen Keuangan (2020), bahwa belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah (PP No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan). Belanja daerah terdiri dari empat komponen yaitu : belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, dan terakhir belanja lainnya.

Pajak Daerah

Pajak daerah adalah, kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Retribusi Daerah

Retribusi daerah ialah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang diberikan untuk kepentingan orang pribadi atau badan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang telah diberikan. Salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan melakukan kegiatan operasional yaitu melakukan belanja untuk kepentingan investasi dan pembangunan sarana prasana publik yang direalisasikan melalui belanja daerah.

Hasil Pengelolaan Yang Di Pisah

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah bagian laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hasil kerjasama dengan pihak ketiga. Pendapatan tersebut antara lain meliputi bagi hasil atas penyertaan modal perusahaan daerah (BUMD), bagi hasil atas penyertaan modal badan usaha milik negara (BUMN), dan bagi hasil atas penyertaan modal pada perusahaan swasta atau kelompok usaha masyarakat. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah diharapkan dapat menjadi penyangga dalam membiayai kegiatan pembangunan daerah. Dimana semakin tinggi penerimaan yang diterima daerah maka semakin tinggi peluang belanja daerah untuk membangun perekonomian daerah dan mensejahterakan masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah adalah penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik Pemerintah Daerah. Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan Dana Perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan Pemerintah (Abdul, 2007).

METODE

Populasi dan Sampel Populasi

Populasi pada penelitian ini adalah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan dan melaporkan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah (PAD) yang sah terhadap belanja daerah. Data yang digunakan berasal dari DJPK Departemen Keuangan. Populasi yang akan diamati adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari 13 kabupaten dan 4 kota. Maka terdapat 15 kabupaten/kota yang dijadikan sampel penelitian dari 17 kabupaten/kota tersebut. Hal ini dikarenakan ada 2 kabupaten (Kab. PALI dan Kab. Musi Rawas Utara) baru berdiri tahun 2013 sehingga belum memiliki data yang lengkap. Adapun metode yang diteliti adalah sebanyak 5 tahun 2016-2020 sehingga jumlah data menjadi 75 data pengamatan.

Jenis Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan bersifat kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder yaitu data yang dikumpulkan dan dipublikasikan kepada masyarakat untuk pengguna data (Kuncoro, 2013). Data tersebut bersumber dari Laporan Realisasi APBD DJPK Departemen Keuangan, artikel, jurnal, buku, dan lain-lain. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan yang dipisah, dan pendapatan asli daerah (PAD) yang sah terhadap belanja daerah Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2016-2020.

HASIL

Analisis Data

Setelah dilakukan outlier dari 75 sampel 66 data dinyatakan sebagai data *outlier* sehingga harus dihapus dari sampel yaitu kabupaten Empat Lawang 2016, 2018, 2019, Kabupaten Ogan Ilir 2016, kota Pagar Alam 2017-2020, kota Palembang 2016. Semua variabel penelitian telah lolos uji asumsi klasik. Hasil uji normalitas, yaitu nilai Kolmogorov-Smirnov (K-S) dan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) dengan seluruh variabel di atas $\alpha = 0,05$ yang berarti data yang diuji terdistribusi normal. Pada hasil uji run test penelitian ini, nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan tidak ada autokorelasi. Hasil uji multikolinearitas menyatakan nilai tolerance untuk seluruh variabel lebih besar dari 10% dan VIF lebih kecil dari 10 yang berarti bahwa data penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas. Hasil uji heteroskedastisitas menyatakan nilai signifikansi untuk setiap variabel bebas terhadap nilai absolute residual lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam penelitian ini. Dengan demikian semua variabel penelitian bisa diuji pada tahapan selanjutnya.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 2 Analisis Regresi Linier Berganda

Model		Coefficients ^a			T	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13,894	1,180		11,774	,000
	Pajak Daerah	,332	,045	,585	7,431	,000
	Retribusi Daerah	,048	,036	,093	1,331	,188
	Hasil Pengelolaan yang Dipisah	,284	,044	,461	6,476	,000
	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah	-,050	,055	-,070	-,919	,362

a. Dependent Variable: Belanja daerah

(Sumber: Data diolah, 2023)

PEMBAHASAN

Variabel Pajak Daerah (X1) Terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan hasil pengelolaan data, variabel pajak daerah memiliki nilai t hitung = 7,431 > t tabel = 1,670 artinya berpengaruh positif dan nilai signifikansi = 0,000 < level of significant (α) = 0,10. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,10 artinya pajak daerah berpengaruh positif. Dapat ditarik kesimpulan bahwa secara parsial variabel pajak daerah berpengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah (Y1).

Variabel Retribusi Daerah (X2) Terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan hasil pengelolaan data, variabel retribusi daerah memiliki nilai t hitung = $1,331 < t$ tabel = $1,670$ artinya berpengaruh negatif dan nilai signifikansi = $0,188 > level$ of significant (α) = $0,05$. Karena nilai signifikansi lebih besar dari $0,05$ artinya retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa secara parsial variabel retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap belanja daerah (Y1).

Variabel Hasil Pengelolaan Yang Dipisah (X3) Terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan hasil pengelolaan data, variabel hasil pengelolaan yang dipisah memiliki t hitung = $6,476 > t$ tabel = $1,670$ artinya berpengaruh positif dan nilai signifikansi = $0,000 < level$ of significant (α) = $0,10$. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari $0,10$ artinya hasil pengelolaan yang dipisah berpengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah (Y1).

Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah (X4) Terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan hasil pengelolaan data, variabel pendapatan asli daerah (PAD) yang sah memiliki nilai t hitung = $-0,919 < t$ tabel = $1,670$ artinya berpengaruh negatif dan nilai signifikansi = $0,362 > level$ of significant (α) = $0,05$. Karena nilai signifikansi lebih besar dari $0,05$ artinya pendapatan asli daerah (PAD) yang sah tidak berpengaruh signifikan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa secara parsial variabel pendapatan asli daerah (PAD) yang sah tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap belanja daerah (Y1).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah Terhadap Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang penulis sajikan dalam bab IV, maka penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil dari uji hipotesis menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah.
2. Berdasarkan hasil dari uji hipotesis menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh signifikan negatif terhadap belanja daerah.
3. Berdasarkan hasil dari uji hipotesis menyatakan bahwa hasil pengelolaan yang dipisah berpengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah.
4. Berdasarkan hasil uji dari hipotesis menyatakan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) yang sah berpengaruh signifikan negatif terhadap belanja daerah.

REFERENSI

- A. P., A. F., & Nuraini, I. (2017). Pengaruh Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2016. *Jurnal Ilmuekonomi*, 163 – 175.
- M. Si, Ak, D., Ramlan, & Dr. Syukri. (2016). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh). *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 79-88.
- Afrianty, F. (2014). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah (Survei Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Barat). *Jurnal Akuntansi*, 1-17.
- Andalusia, F. D. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Empiris Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017). *Jurnal Akuntansi*, 1-14.

- Asih, S.E., M.Si, S., & Se., M.Si, I. (2018). Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah Dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Belanja Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Pemerintah Kabupaten Dan Kota. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 177-191.
- Bahasoan, A. N., Rahmat, A., & Nurhajra, A. (2020). Pengaruh Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Barat Periode 2015-2018. *Media Bina Ilmiah* 15, 4245-4256.
- Damahendra, & Kristanto. (2021). Studi Global Atas Mitigasi Dampak Pandemi Covid-19 Melalui Kebijakan Pajak. *Jurnal Proaksi*, 256-266.
- Dewa, C., & Safitri, L. (2021). Pemanfaatan Media Sosial Tiktok Sebagai Media Promosi Industri Kuliner Di Yogyakarta Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Akun Tiktok Javafoodie). *Khasanah Ilmu : Jurnal Pariwisata Dan Budaya*, 65-71.
- Dewi, E. P. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Dana Alokasi Khusus (Dak) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat Tahun 2012-2017. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora* , 26.
- Dewi, N. R., & Saputra, I. D. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Ni. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1745-1773.
- Efendri, & Syafitri, A. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Di Indonesia Periode 2014-2019) . *Jurnal Akuntansi*, 1-13.
- Gunantara, P. C., & Dwirandra, A. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dann Dana Alokasi Umum Pada Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Pemoderasi Di Bali. *E-Jurnal Akuntansi*, 529-546.
- Hafandi , Y., & Romandhon. (2020). Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Retribusi Daerah, Dan Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo. *Journal Of Economic, Management, Accounting And Technology (Jematech)* , 182-191.
- Halim, A., & Abdulla, S. (2006). Hubungan Dan Masalah Keagenan Di Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 53-64.
- Hanna, N. (2021). Mekanisme Pemungutan Pajak Restoran Dan Kontribusinya Terhadap Pajak Daerah Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang Selama Pandemi Covid-19 Tahun 2020. *E-Journal*, 34-67.
- Heryanti, C. D. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur. *Stiesia Surabaya*, 54-67.
- Jaya, J. D., & Sisdyani, E. A. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Belanja Modal Pada Kelengkapan Pengungkapan Informasi Keuangan Daerah Melalui Situs Resmi Pemerintah Provinsi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 163-179.
- Kartiko, N. D. (2020). Insentif Pajak Dalam Merespons Dampak Pandemi Covid-19. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 124-137.

- Keuangan, K. (2020). Kajian Fiskal Regional. *Kementrian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan*, 1-150.
- Mawarni, D., & Abdullah, S. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Aceh). *Jurnal Akuntansi Issn 2302*, 01-64.
- Ningsih, S., & Hidayatulloh, A. (2020). Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Pemilik Restoran Untuk Membayar Pajak Restoran. *Jurnal Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan*, 1876-2599.
- Novalistia, R. (2016). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Atau Kota Di Provinsi Jawa Tengah (Studi Empiris Pada Kabupaten / Kota Provins. *Journal Of Accounting*, 1-25.
- Octavianya, F., Rustanto, A., & Kartini, I. (2021). Analisis Pelayanan Pajak Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli. *Jurnal Reformasi Administrasi : Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 10-21.
- Paramitha. (2021). Kebijakan Pengaturan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Sebagai Dampak Wabah Covid-19 Dalam Rangka Pemenuhan Pendapatan Asli Daerah . *Jurnal Supremasi*, 94-104.
- Pitaloka. (2020). Prosedur Penagihan Pajak Restoran Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pajak Daerah Kota Surabaya . *E-Jurnal Ekonomi* , 52-98.
- Prismadani, G. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Silpa, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Moderating Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2016. *Jurnal Akuntansi*, 1-18.
- Putra, A. A., & Budiasih, I. A. (2017). Kinerja Keuangan Daerah Memoderasi Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Pada Pertumbuhan Ekonomi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1436-1462.
- Putrayuda, T. F., Yulia, E., & Kamaliah. (2017). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau), Dana Bagi Hasil (Dbh) Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Dampaknya Pada Tingkat Kemiskinan Di Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2011-2015. *Jurnal Tepak Manajemen Bisnis*, 198-224.
- Ram dini, S., & Mulyani, H. (2021). Pengaruh Pajak Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka Periode 2017-2019. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Sistem Informasi*, 151-172.
- Rompas. (2019). Analisis Pemungutan Pajak Restoran Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa . *E-Journal*, 245-260.
- Rubiyanto, & Rahayu. (2019). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Mojokerto Periode 2013-2017. *Majalah Ekonomi*, 92-107.
- Saraswati, D. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Dana Perimbangan Sebagai Pemoderasi Di Kabupaten/Kota Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi*, 54-68.

- Saraswati, I. A., & Ramantha, I. W. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Dan Investasi Swasta Sebagai Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 44-78.
- Siswiyanti, P. (2017). Pengaruh Pad, Dau, Dak, Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi*, 1-17.
- Statistik, B. P. (2020, March 5). Retrieved June 3, 2021, From [Http://Www.Jatim.Bps.Go.Id](http://Www.Jatim.Bps.Go.Id)
- Styaningrum, R. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah tahun 2015-2017) . *Jurnal Akuntansi*, 23-34.
- Sudarmaji, W. (2021). Analisis Tentang Pajak Restoran Dalam Pandangan Maqashid Syariah Imam Abu Ishaq As-Syatibi (Study Kasus Di Restoran Ikan Bakar Stasioen Purworejo). *Jurnal Mustanir*, 333-345.
- Sudika, I., & Budiarta, I. (2017). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Pada Belanja Modal Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1689-1718.
- Sugiarthi, N. D., & Supadmi, N. L. (2014). Pengaruh Pad, Dau, Dan Silpa Pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 16-23.
- Sutrisno, M., & Santoso, A. (2021). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel. *Majalah Inspiratif*, 79-99.
- Syafi'i. (2017). Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. *E-Jurnal Ekonomi*, 6-48.
- Syahputra, R. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia . *Jurnal Samudra Ekonomika*, 183-191.
- Syamsuddin. (2021). Dampak Covid 19 Terhadap Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Di Kota Makassar. *Journal Of Business Administrasion*, 455- 465.
- Syukri, M., & Hinaya. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten & Kota Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Of Economic, Management And Accounting*, 1-37.
- Tahar, A., & Zakhiya, M. (2011). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi Vol. 12*, 1-99.
- Tanjung, N. R. (2021). *Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Anggaran Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Di Provinsi Sumatera Utara Periode 2015-2019*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara .
- Tenriwaru, Wiridiya, A., & Samad, S. (2020). Menggali Realitas Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik. *Economos : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 129-136.
- Trisnawati, & Sudirman. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Di Kota Denpasar . *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 975-1000 .

- Umatin, S., Diana, N., & Mawardi, M. (2021). Pengaruh Kebijakan Pemerintah Dalam Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (Psbb) Terhadap Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Kota Malang. *E- Journal* , 234 - 240.
- Utami, D. N., & Indrajaya, I. G. (2019). Pengaruh Pad Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesjahteraan Masyarakat Di Provinsi Bali. *Jurnal Ep Unud 8 (10)*, 2195-2225.
- Yasin, M. (2020). Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten/Kota Jawa Timur. *Journal Of Economic, Business And Accounting*, 33-45.
- Yuliyanti, S. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2016) . *Naskah Publikasi* , 1-15.
- Yupukolo , K., & Erawati , T. (2019). Pengaruh Pajak Daerah Retribusi Daerah Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Dana Alokasi Umum Belanja Daerah Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2012-2017. *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara*, 242-251.